



Di DIJ Hanya Dua OPD di Kota Jogja yang Peroleh Penghargaan Bebas Korupsi

## "Eva Arnaz" dan "Sujud Sutrisno" Ikut Cegah Korupsi

Dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Jogja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) dan UPT Puskesmas Mantrijeron, memperoleh penghargaan. Kali ini dalam penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM dari Kementerian PAN RB. Kenapa hanya dua OPD itu yang memperoleh WBK di DIJ?

**WILAYAH** bebas korupsi (WBK) bukan berarti bebas melakukan korupsi. Tapi tidak ada tindak korupsi dalam pelayanan ke masyarakat. Juga pelayanan yang optimal ke masyarakat yang diwujudkan dalam wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Dampaknya meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat.

Dari 51 OPD di Pemkot Jogja, ada tujuh yang diajukan ke Kemenpan RB untuk dilakukan verifikasi. Hasilnya hanya DPK Kota Jogja dan Puskesmas Mantrijeron yang mendapat anugerah WBK. Penghargaan disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (10/12). Kepala DPK Kota Jogja Wahyu Hendratmoko mengaku tidak tahu persis kenapa unit kerjanya yang terpilih. Termasuk kelebihan DPK Kota Jogja sehingga terpilih.

► Baca Eva Arnaz... Hal 7



PRESTASI: Dari kiri, Kepala DPK Kota Jogja Wahyu Hendratmoko, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi, Kepala Puskesmas Mantrijeron drg Ambarwati Tri Winayu, dan Kepala Inspektorat Kota Jogja Maryoto. Foto kanan, Fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Mantrijeron.



# "Eva Arnaz" dan "Sujud Sutrisno" Ikut Cegah Korupsi

Sambungan dari hal 1

"Di internal Pemkot, Inspektorat yang menilai unit kerja mana saja yang layak diajukan ke Kemenpan RB dalam upaya pencegahan korupsi," katanya kemarin (11/12).

Tapi Wahyu menyebut, dalam pencegahan korupsi yang berdampak ke pelayanan masyarakat sudah dilakukan DPK Kota Jogja. Terutama dalam pengawasan penggunaan anggaran. Karena ada 'Eva Arnaz' yang mengawasi. Merupakan akronim dari evaluasi anggaran dan kinerja dinas. "Tanggal 5 setiap bulannya kami adakan evaluasi selama sebulan lalu apa saja yang dilakukan, dan rencana yang dikerjakan pada bulan tersebut," jelasnya.

Dalam evaluasi itu, jika ada kendala akan diselesaikan lintas bidang. Juga diketahui harapan pembelanjaan bulan itu dan harus dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya. "Hasilnya penyerapan anggaran kami

bisa di atas 97 persen. Harapannya tahun ini bisa 98 persen," kata mantan kepala Bagian Protokol Pemkot Jogja itu.

Tapi Wahyu buru-buru menambahkan. Tak sekadar besaran serapan yang diinginkan. Dia mengaku, di DPK Kota Jogja memiliki *tagline* bekerja 'Sujud Sutrisno'. Yaitu, sungguh-sungguh berjanji untuk diri sendiri supaya tidak melakukan *no yang three*. "No yang *three* itu, *no fiktif*, *no mark up* anggaran, dan *no feedback* atau tidak boleh menerima apa pun dan dari siapa pun," tegasnya.

Begitu pula dengan Kepala Puskesmas Mantrijeron drg Ambarwati Tri Winayu. Ambar mengatakan, memang ada beberapa inovasi yang dilakukan Puskesmas Mantrijeron. Di antaranya pada sistem kasir yang diintegrasikan dalam sistem informasi dan manajemen Puskesmas (Simpus) sejak 2016. Dengan integrasi itu, bisa dihindari terjadinya *pungli* (pungutan

liar), kesalahan hitung, hingga mempercepat pelayanan. "Karena tarif sudah ditentukan dan kami melalui Simpus bisa memantau. Bahkan dari Dinas Kesehatan," ungkapnya.

Begitu pula untuk memperpendek antrean. Sebelum adanya pemesanan antrean via *online*. Yaitu melalui aplikasi *WhatsApp*. Sehari sebelum periksa ke Puskesmas, bisa daftar terlebih dahulu. "H-1 kontak lewat *WhatsApp*, esoknya langsung ke poli yang dituju dan disiapkan rekam medisnya," kata perempuan asal Kotagede ini.

Baik Ambar maupun Wahyu menambahkan, dalam penilaian yang dilakukan Kemenpan RB salah satunya berdasarkan survei persepsi korupsi. Petugas dari Kemenpan RB akan mendatangi tiap unit kerja dan menanyakan langsung masyarakat. Survei persepsi korupsi itulah yang disebut banyak membuat

unit kerja lainnya gagal memperoleh penghargaan.

Sementara itu Wakil Wali Kota Jogja Horoe Poerwadi (HP) mengapresiasi OPD di Pemkot Jogja yang kembali memperoleh penghargaan WBK. Menurutnya, itu merupakan hasil kerja keras yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. "Yaitu pelayanan yang cepat, transparan, memuaskan dan tidak ada *pungli*," kata HP yang turut mendampingi penyerahan penghargaan di Jakarta.

Mantan wartawan itu menyebut, dari Inspektorat Kota Jogja sebenarnya mengajukan tujuh OPD. Tapi hanya DPK dan Puskesmas Mantrijeron yang akhirnya memperoleh penghargaan. Dia berharap nantinya akan makin banyak OPD yang memperoleh penghargaan serupa. "Ini wujud nyata Pemkot Jogja sudah menerapkan zona integritas dan dilaksanakan dengan baik dan berkualitas," katanya. (\* /pra/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Puskesmas Mantrijeron			
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsip			

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005